

ABSTRAK

Layanan HT-el merupakan bentuk pemberian pelayanan dari Kementerian ATR/BPN dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. HT-el merupakan pilihan untuk mendaftarkan hak tanggungan sehingga masyarakat dapat mendaftarkan HT baik secara manual maupun melalui sistem HT-el. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2019 (Permen ATR/KBPN 9/2019). Pelaksanaan Permen No. 9/2019 tentang HT elektronik masih tergantung kesiapan masing-masing kantor pertanahan dalam menerapkan sistem elektronik. Banyak kelebihan yang didapatkan dalam fitur pendaftaran secara online, akan tetapi tidak sedikit juga kekurangan yang ada di dalamnya. Salah satu kelebihan yang di dapatkan dalam pendaftaran secara online ini adalah dapat menghemat waktu bagi para pengguna birokrasi pertanahan, tentu harapan utama efektif dan efisiensi birokrasi benar-benar dapat tercapai. Tujuan penelitian ini ingin melihat pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Terintegrasi secara elektronik berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2019 Juncto Nomor 5 Tahun 2020 dalam konstruksi nilai hukum dan dampak yang timbul dengan adanya perubahan cara pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik dalam konstruksi sistem hukum dan kendala-kendalanya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data primer yang penulis peroleh di lapangan yaitu tentang tanggung jawab PPAT dalam penerapamdan pelaksanaan system pendaftaran hak tanggungan elektronik.

Hasil penelitian ini membahas mekanisme pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik merupakan layanan terobosan yang berbasis digital atau elektronik yang diluncurkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memudahkan pengurusan pertanahan berdasarkan asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi informasi agar prosedur pelayanan Hak Tanggungan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga cita-cita untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha.

Kata Kunci: Pelayanan, Hak Tanggungan, Elektronik

ABSTRACT

The HT-el service is a form of service provision from the Ministry of ATR/BPN in facilitating services to the community by utilizing the development of information technology. HT-el is an option to register mortgage rights so that people can register HT either manually or through the HT-el system. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Head of the National Land Agency Number 9 of 2019 concerning Electronic Integrated Mortgage Services which came into force on June 21, 2019 (Permen ATR/KBPN 9/2019). Implementation of Regulation No. 9/2019 regarding electronic HT still depends on the readiness of each land office in implementing the electronic system. Many advantages are obtained in the online registration feature, but there are also many shortcomings in it. One of the advantages obtained in this online registration is that it can save time for land bureaucratic users, of course the main hope is to be effective and bureaucratic efficiency can really be achieved. The purpose of this study is to see the implementation of Integrated Electronic Mortgage services electronically based on the Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 9 of 2019 Juncto Number 5 of 2020 in the construction of legal values and the impacts that arise with changes in the way of registration of Electronic Mortgages in the construction of legal systems and obstacles -obstacles.

This research method uses an empirical juridical approach. The empirical juridical research in this study analyzes the problems that have been formulated by combining primary, secondary and tertiary legal materials. The primary data that the author obtained in the field is about PPAT's responsibility in implementing and implementing the electronic mortgage registration system.

The results of this study discuss the mechanism for registering Mortgage Rights electronically, which is a digital or electronic-based breakthrough service launched by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to facilitate land management based on the principles of openness, timeliness, speed, convenience and affordability in the context of public services. , as well as to adjust the development of law, information technology so that the Mortgage service procedure becomes more effective and efficient so that the goal is to increase the rating of ease of doing business.

Keywords: *Services, Mortgage, Electronics*